

Politik dan Administrasi



Sri Yuliani
FISIP UNS

TOPIK :

- **What is Politics**
- **What is Administration ?**
- **Dikotomi Politik dan Administrasi**
- **Kontinum Politik dan Administrasi**

Miriam Budiardjo :

- Didefinisikan bermacam-macam dilihat dari unsur-undur pokoknya , yaitu :
 - Negara :
 - Kekuasaan
 - Pengambilan keputusan
 - Distribusi dan alokasi nilai

Politik = Negara

- Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya
- Ilmu politik mempelajari negara, tujuan negara, lembaga-lembaga yang melaksanakannya, hubungan negara dan warga negara dan dengan negara-negara lain.

Politik = Kekuasaan

- Kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku.
- Politik mencakup semua kegiatan yang menyangkut masalah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan → Perjuangan merebut kekuasaan (**Power struggle**)



Politik = Pengambilan Keputusan

- Politik adalah pengambilan keputusan yang diambil secara **kolektif** dan **mengikat seluruh masyarakat** dan untuk mencapai tujuan masyarakat.
- Politik adalah **pengambilan keputusan kolektif** atau **kebijaksanaan publik** untuk masyarakat seluruhnya
- Obyek politik : **kebijakan pemerintah (publik), proses terbentuknya dan akibat-akibatnya.**



Politik = Distribusi dan Alokasi Nilai

- Politik : membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai dalam masyarakat
- Politik = masalah **Siapa mendapat Apa , Kapan,dan Bagaimana**
- Sistem politik = keseluruhan dari interaksi yang mengatur **pembagian nilai-nilai secara otoritatif** (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat



What is Administration?

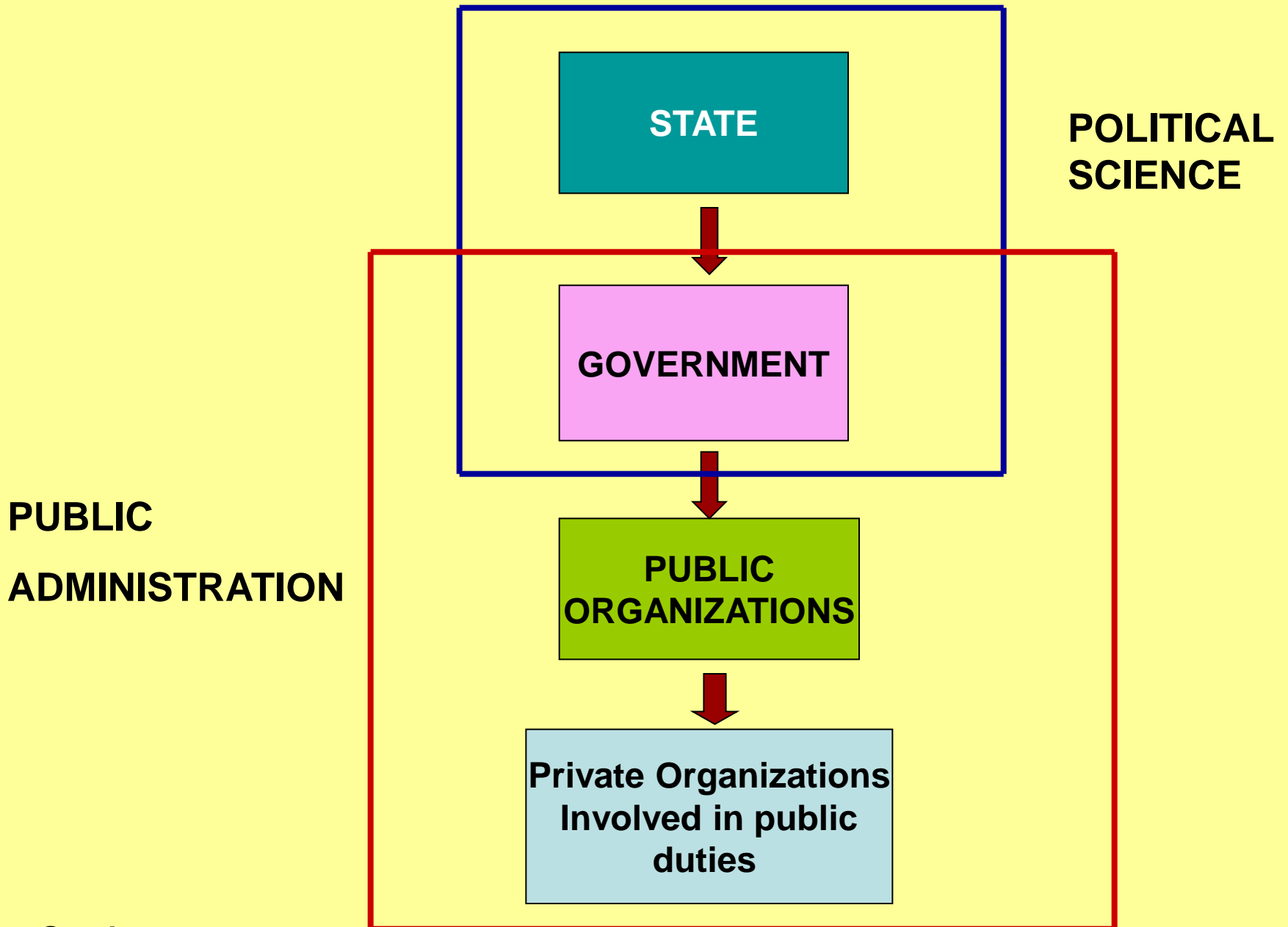
The background of the slide is a stylized landscape. It features rolling green hills in the foreground and middle ground, with a light brown path winding through them. The sky is a gradient of blue, with white, wispy clouds. The overall style is clean and modern, typical of a presentation slide.

ADMINISTRASI (PUBLIK)

- Administration = menunjuk pemerintahan **eksekutif**, misal : Obama administration, SBY administration.
- **Gerald Caiden** :
Adm. Publik menunjuk pada **implementasi keputusan/ kebijakan** yg dibuat oleh otoritas publik yang sah.
- Adm. Publik **mengimplementasikan** tujuan publik sebagaimana telah ditetapkan badan politik



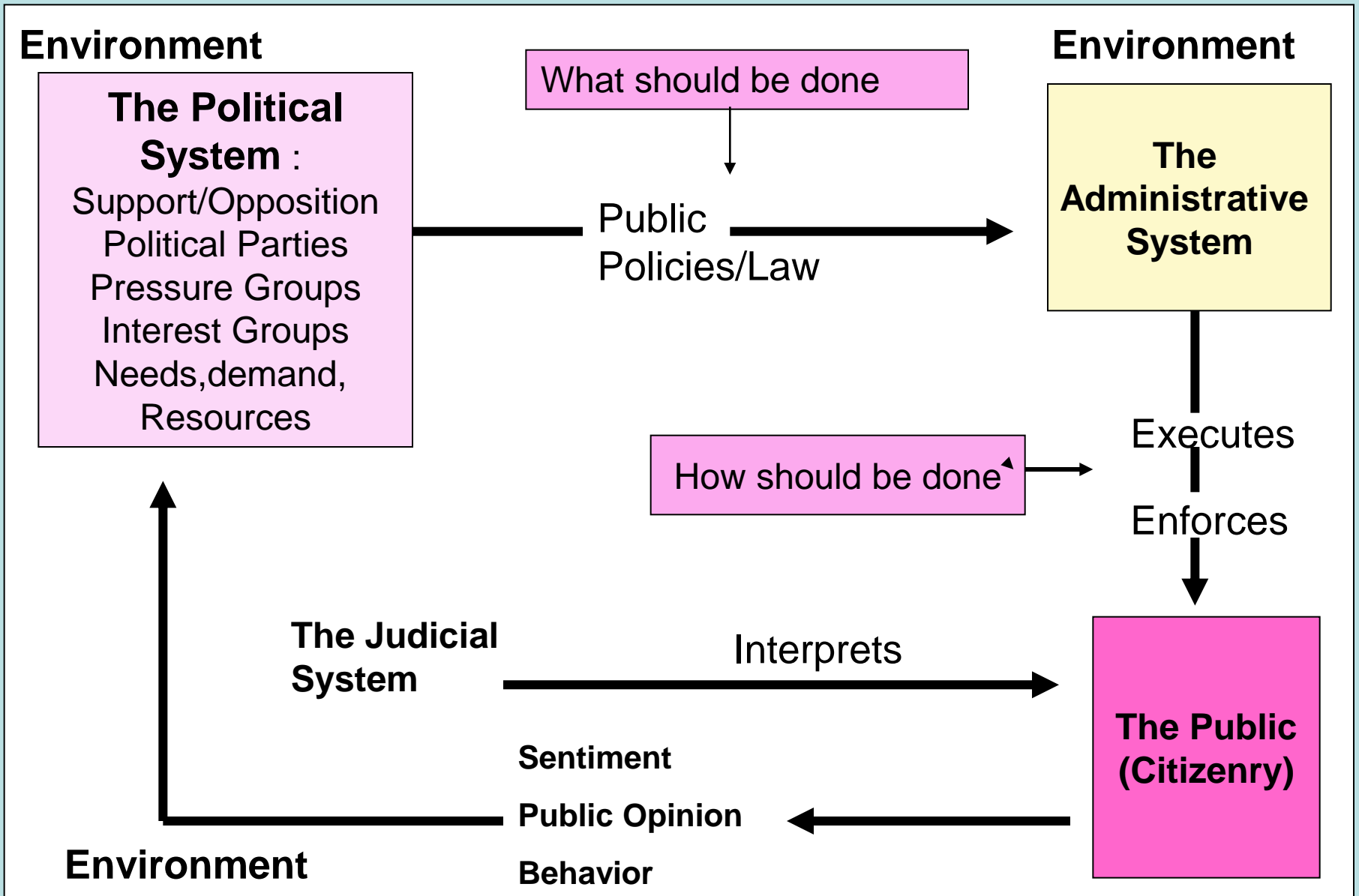
Adm.publik mencakup organisasi urusan-urusan publik, tujuan sosial dan pengambilan keputusan kolektif, manajemen lembaga negara, kantor pemerintah, kekayaan negara dan administrasi pegawai atau aparatur negara, baik sikap , perilaku maupun tindakan mereka (Caiden)



Sumber :

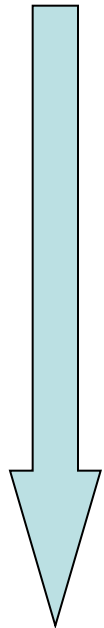
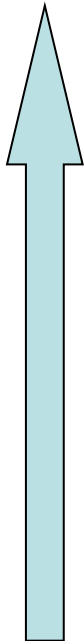
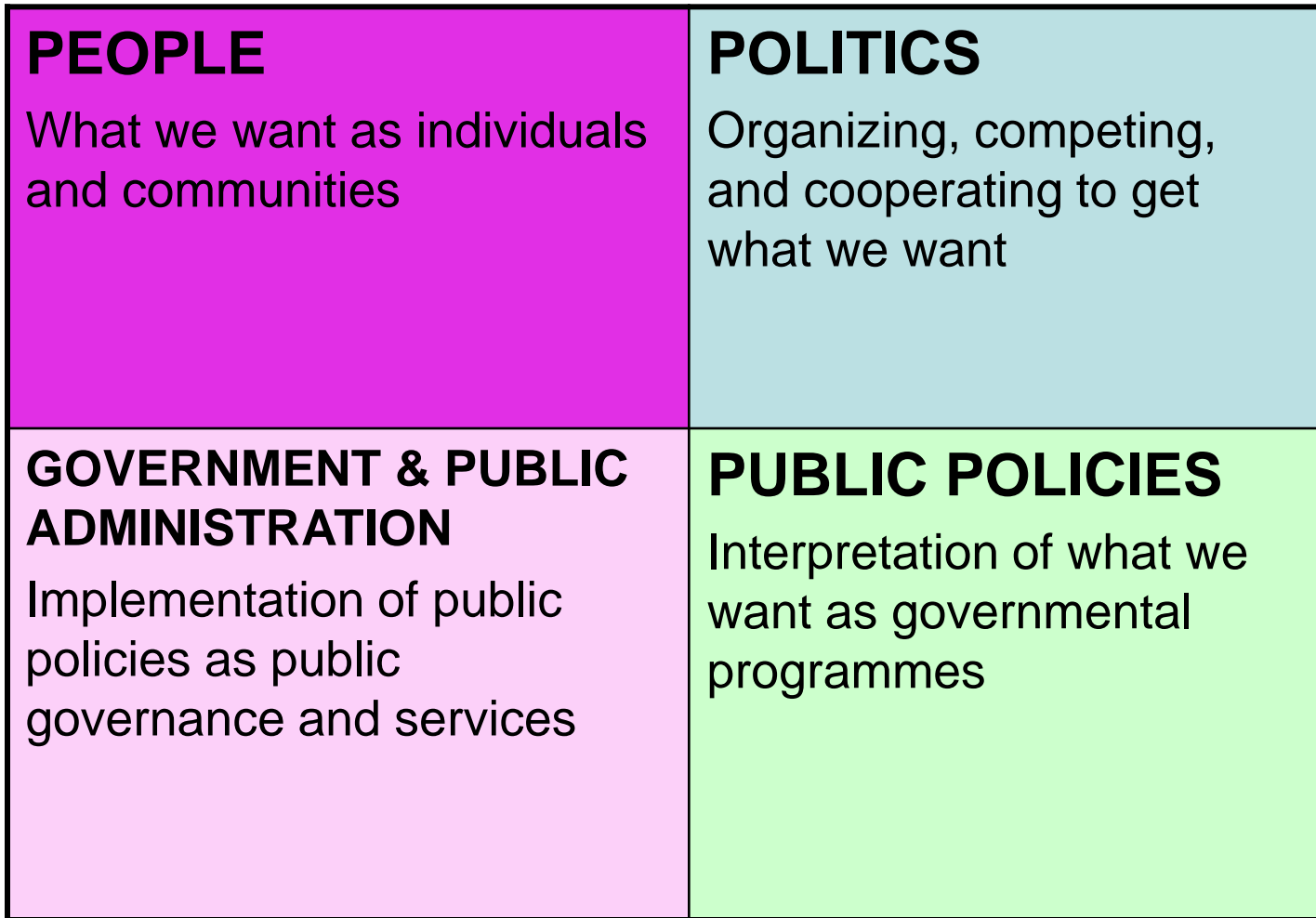
Esa Hyrylainen. Politic and Administration. Faculty of Public Administration. Univ. Vaasa

Hubungan Politik dan Administrasi



Sumber diolah dari : Danilo R. Reyes. Bureaucracy and Transition : Some Reflections on Redemocratization and Politics-Administration Dichotomy. Univ. of the Philippines

Hubungan Politik dan Administrasi



Sumber : Esa Hyyrylainen (dengan modifikasi)

Dikotomi Politik dan Administrasi



Dikotomi Politik-Administrasi



- “Administration **lies outside** the proper sphere of politics. Administrative questions are not political questions. Although politics sets the tasks for administration, it should not be permitted to manipulate its offices...The field of administration is the field of business. It is removed from the hurry and strife of politics.
- Woodrow Wilson (The Study of Administration)

Dikotomi Politik-Administrasi



”Civil service reform is ..clearing the moral atmosphere of official life by establishing sanctity of **public office as a public trust**, and, **making the service unpartisan** is opening the way for making it **businesslike**.”
(The Study of Administration)



Dikotomi Politik dan Administrasi

Woodrow Wilson (1887) :

POLITIK :

- **Who** shall make **law** and **what** shall that law be
- State activity in things **great** and **universal**
- **General plan**

ADMINISTRASI :

- Government in action
- It is the **executive**, the operative, the most visible part side of government
- How **law** should be **administered**
- Administration lies **outside** of the sphere of politics
- Activity of the state in **individual & small things**
- **Special means**

IDEAL

- Administrasi (negara) idealnya harus lepas dari pengaruh kepentingan politik → **Political Neutrality**
- Politik dan Administrasi adalah dua wilayah yang berbeda.
 - Politik : bagaimana membuat atau **merumuskan kebijakan.**
 - Administrasi : bagaimana melaksanakan (**implementasi kebijakan publik**)
- Untuk itu dibutuhkan : Birokrasi yang **netral politik**



Birokrasi Rasional (Weberian) : adil dan tidak memihak (**impartial**) , tidak melihat pribadi (**impersonal**) dan **profesional**

REALITAS:

Birokrasi :

- menerjemahkan tujuan kebijakan → program2 konkrit
- Kebijakan/UU luas /umum → aturan pelaksana



- melakukan **discretion** → **kebebasan membuat peraturannya sendiri**

Administrative discretion :

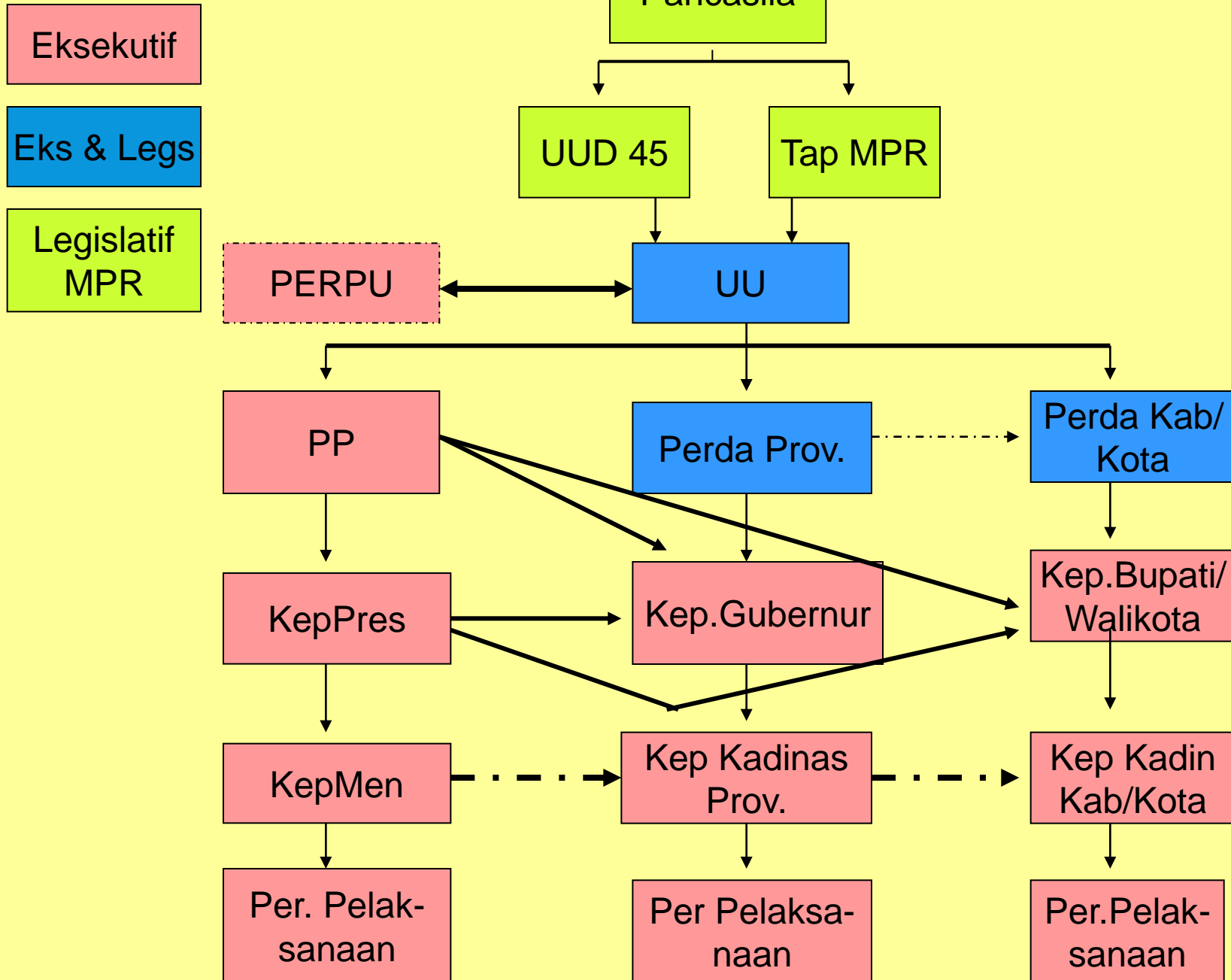
Kewenangan utk menginterpretasikan kebijakan publik makro ke dalam kebijakan/aturan pelaksanaan = kekuasaan membentuk kebijakan= kekuasaan politik

Kontinum Politik dan Administrasi

The background of the slide is a photograph of a tropical beach. In the foreground, several large, smooth, brownish boulders are scattered across the light-colored sand. In the mid-ground, there are more boulders and some green foliage. In the background, several tall palm trees are visible against a cloudy, overcast sky. The overall scene is a serene tropical landscape.

Kontinum Politik dan Administrasi

- Politik dan administrasi merupakan satu garis (kontinum) = antara politik (perumusan kebijakan publik) dan adm. (implementasi kebijakan publik) merupakan satu proses yang tidak dapat dipisahkan
- **Bukti :**
 - Administrative discretion
 - Peran serta pejabat birokrasi dalam perumusan kebijakan (misal Perda, PP, dsb)



Implikasi Praktis Dikotomi Politik dan Administrasi : Netralitas PNS



Netralitas PNS

Dasar Hukum :

- UU No 43 Tahun 1999 – Pokok – Pokok Kepegawaian
- PP No 5 Th 1999 – PNS menjadi pengurus / anggota parpol
- UU No 22 Th 2003- PNS menjadi wakil rakyat
- Keputusan Kepala BKN - Netralitas PNS dalam Pemilu

- **UU No 43 Th 1999 pasal 3 ayat 3 :**
PNS harus netral dari semua golongan dan parpol serta tidak diskriminatif dalam melayani masyarakat.
- **PP No 5 Th 1999 pasal 7 ayat 2 :**
Seorang PNS yang menjadi anggota, dan atau pengurus parpol, selambatnya tiga bulan setelah berlakunya PP, harus mengajukan permohonan lewat atasan langsung. Jika diizinkan, yang bersangkutan harus melepas statusnya sebagai PNS.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
No : K.26-30/V.31-3/99 Jakarta, 12 Maret 2009 ttg **Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum** Calon Legislatif dan Capres/Cawapres a.l mengatur :

- **Netralitas PNS** adalah PNS bersikap tidak memihak dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis
- PNS sebagai unsur aparatur Negara harus **netral** dari pengaruh semua golongan dan partai politik, **tidak diskriminatif** dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik
- PNS yang akan menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota harus **mengundurkan diri** dan tidak dapat ditarik kembali



Netralitas PNS

PNS sbg Peserta Kampanye dilarang :

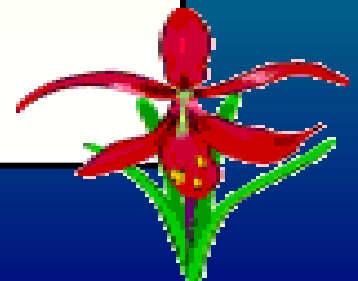
- Menggunakan **fasilitas pemerintah**
- Menjanjikan atau **memberikan uang** atau materi lainnya kpd PNS dan anggota masyarakat
- Menggunakan **atribut partai** atau **pakaian seragam** dan **atribut PNS**
- Mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya, dan menggunakan **fasilitas Negara**
- Memihak dan memberikan **dukungan** kpd Parpol, Caleg, Capres/Cawapres

Mengapa PNS harus netral ?

Ideologi Pelayanan Publik :

1. Administrasi publik adalah mesin atau alat pelaksana kehendak publik sebagaimana ditetapkan oleh badan legislatif. Pemerintah mrpk lembaga kepercayaan publik yg digunakan untuk **kepentingan publik** dan **bukan utk kepentingan pribadi** atau sekelompok orang
2. Pegawai negeri merupakan **abdi** masyarakat dan bukan sebaliknya
3. Pegawai negeri seharusnya menjadi **perwujudan dari kebaikan publik**. Mereka mrpk pegawai yg suka kerja keras, jujur , tidak memihak, bijaksana, adil dan dapat dipercaya

4. Pegawai negeri harus **mematuhi atasannya** dan tidak mengutamakan kepentingan atau pandangan pribadinya
5. Pegawai negeri harus melaksanakan tugas-tugasnya secara **efisien** dan **ekonomis**
6. Penempatan ke dalam jabatan publik harus didasarkan pada kecakapan atau **keahlian** bukan pada hak istimewa
7. Pegawai negeri harus **tunduk pada hukum** sebagaimana warga negara lainnya





Praktek :

Orde Lama :

• **Demokrasi Liberal**

- Parlementer; multi-party system
- Bureau-nomia : kekuatan non-birokrasi mendominasi birokrasi

• **Demokrasi Terpimpin**

- Pusat kekuatan : Presiden, TNI dan PKI dgn dominasi Presiden
- Konsep NASAKOM

• Orde Baru (1965-1998):

- PNS disatukan dlm KORPRI berafiliasi ke GOLKAR
- **Monoloyalitas PNS**
- Birokrasi sbg alat status-quo dan sentralistis

• Orde Reformasi :

- Multipartai
- Netralitas PNS